

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Patimura No. 77 (0361) 227926 Fax. (0361) 223562
DENPASAR
2023



KATA PENGANTAR

Puja Pongastuti dan Angeyu Bagya kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Bali pada tahun-tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali ini diharapkan dapat menjadi parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Untuk itu besar harapan kami untuk mendapat masukan, saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk dapat lebih menyempurnakan Laporan ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dalam proses penyusunan laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Bali, Pebruari 2023
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali,

Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. 19670714 199403 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum Organisasi	1
1.1.1 Kedudukan	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Susunan Organisasi	1
1.1.4 Isu-Isu Strategis	2
1.2. Visi dan Misi	4
1.2.1 Visi	4
1.2.2 Misi	4
1.3 Tujuan dan Sasaran	4
1.3.1 Tujuan	4
1.3.2 Sasaran	4
1.3.4 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja	9
2.2.1 Penetapan Kinerja	9
2.2.2 Indikator Kinerja Utama	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	11
3.1.1 Pengukuran Kinerja	11
3.1.2 Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja	13
3.2 Aspek Keuangan	26



BAB IV PENUTUP

4.1	Tinjauan Umum	28
4.2	Tinjauan Khusus	28
4.3	Saran	29



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 ini disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Periode 2019-2023 dimana indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 ini menyajikan Program, Kegiatan, Anggaran, Indikator Capaian, masalah dan upaya mengatasi masalah agar pencapaian program pada tahun mendatang menjadi lebih baik lagi.

Indikator kinerja yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, dengan menggunakan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) dari pelaksanaan kegiatan strategis tahun 2022 dan menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

1.1.1 Kedudukan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Bali. Dasar Hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

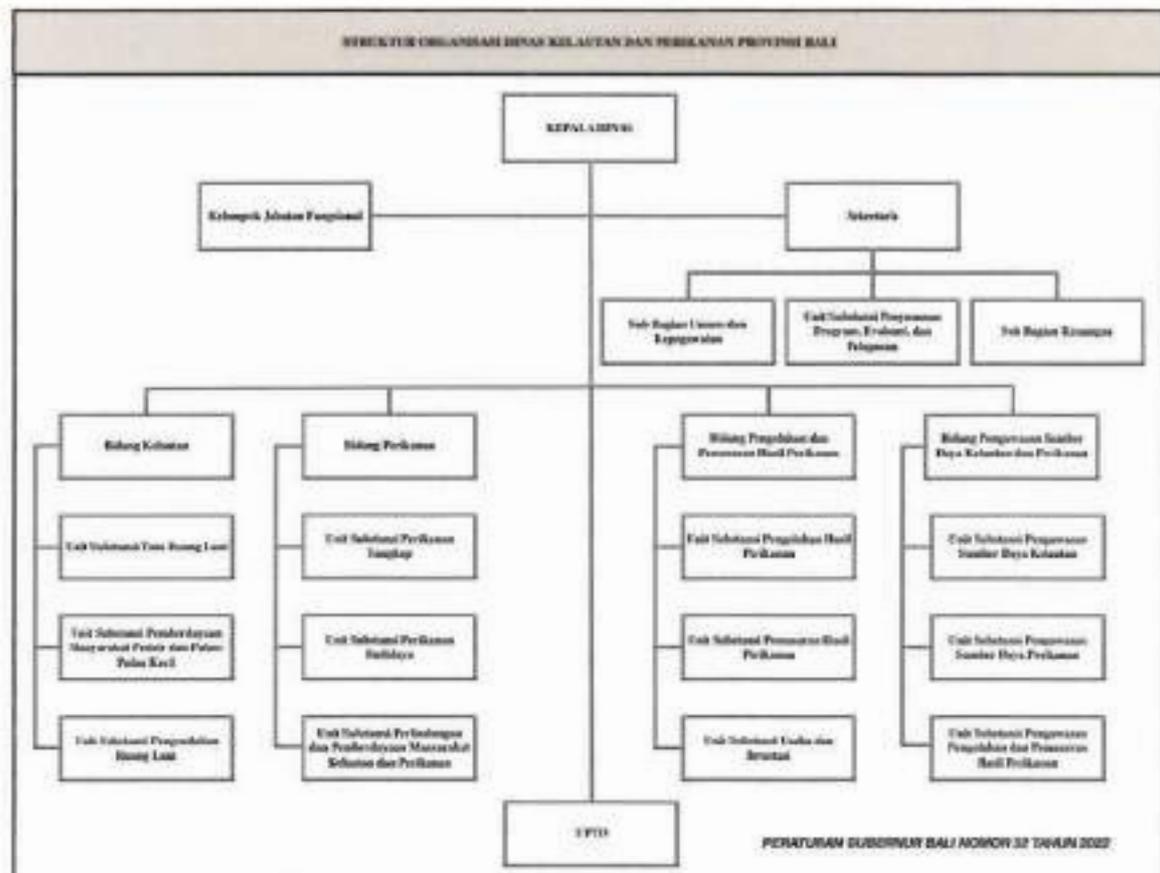
Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 pasal 5, adalah Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah serta melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 90 Tahun 2016 pasal 6 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi
- (2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi
- (3) Penyelenggaraan Administrasi Dinas Bidang Kelautan dan Perikanan
- (4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- (5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tertera dalam susunan sebagai berikut :



1.1.4 Isu – Isu Strategis

Secara geografis letak Provinsi Bali berada pada bagian tengah kepulauan Indonesia sangat strategis yang diapit oleh 2 (dua) benua yaitu benua Asia dan Australia dan 2 (dua) samudra, India dan Pasifik yang menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam baik sumberdaya hayati maupun non hayati seperti sumber daya ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun, mineral, minyak bumi dan sumber energi lainnya. Secara umum sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dibagi atas 4 (empat) kelompok yaitu : (1) Sumberdaya dapat pulih (*Renewable resources*), (2) Sumber daya tidak dapat pulih (*Non renewable resources*), (3) Energi kelautan, (4) Jasa-jasa lingkungan kelautan (*Environmental services*). Sumberdaya dapat pulih meliputi : berbagai jenis ikan, udang, kekerangan, kepiting, rumput laut dan biota lainnya, sedangkan sumberdaya tidak dapat pulih diantaranya mineral, bahan tambang/galian, minyak bumi dan gas, sumberdaya energi kelautan terdiri dari : OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*), pasang surut, arus, gelombang dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk jasa-jasa lingkungan kelautan adalah pariwisata dan perhubungan laut.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai saat ini belum optimal dan dihadapkan pada beberapa isu-isu strategis yaitu:

- a) Belum optimalnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan;
- b) Masih rendahnya daya saing produk kelautan dan perikanan;
- c) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan;
- d) Menurunnya kualitas ekosistem perairan umum, pesisir dan laut; dan
- e) Belum optimalnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pendapatan daerah.

Dalam kaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, jika dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yang merupakan kesepakatan Internasional, maka akan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga sasaran tiga pilar utama pembangunan nasional yaitu *Pro-poor*, *Pro-job* dan *Pro-growth* akan dapat tercapai sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan Bali secara optimal dan berkelanjutan yakni melalui revitalisasi perikanan akan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan daya saing dan kualitas / mutu produk hasil perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dalam hal ini revitalisasi perikanan Provinsi Bali difokuskan pada pengembangan komoditas utama yaitu ikan tuna, rumput laut dan udang dengan tidak mengesampingkan komoditas lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis penting yaitu udang galah, gurami, nila, mas/karper, lele, kerapu, kekerangan dan komoditas perikanan lainnya



1.2 VISI DAN MISI

1.2.1 VISI

"Nangun Sad Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana"

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia, sakalaniskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

1.2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka *misi* Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1 TUJUAN

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing hasil perikanan

1.3.2 SASARAN

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Dari 117,9% pada tahun 2021 menjadi 119,2% pada tahun 2023
2. Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap dari 103.104,42 ton pada tahun 2021 menjadi 107.269,84 ton pada tahun 2023
3. Mewujudkan jumlah produksi perikanan budidaya dari 18.981,2 ton pada tahun 2021 menjadi 19.360,82 ton pada tahun 2023
4. Mewujudkan jumlah produksi garam dari 6.880,90 ton pada tahun 2021 menjadi 7.158,89 Ton pada tahun 2023



5. Mewujudkan jumlah produksi Olahan dari 49.017,38 ton pada tahun 2021 menjadi 50.997,67 pada tahun 2023
6. Mewujudkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 863.220.000 pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.243.036.800.00 pada tahun 2023
7. Mewujudkan kawasan konservasi perairan dari 3 kawasan pada tahun 2021 menjadi 5 kawasan pada tahun 2023

1.3.3 STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka merealisasikan pembangunan perikanan dan kelautan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Cara mencapai tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 dikembangkan melalui penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Strategi Pembangunan

Pembangunan kelautan dan perikanan ke depan selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor kelautan dan perikanan juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah/ nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan serta masyarakat pesisir lainnya sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan termasuk jasa-jasa kelautan serta dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka strategi pembangunan *kelautan dan perikanan* yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- (1) Optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dengan tetap terjaga kelestariannya
- (2) Pemberdayaan masyarakat pesisir
- (3) Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan
- (4) Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
- (5) Penggalian potensi pendapatan baru dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang telah ada



2. Kebijakan

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada mendayagunakan sumberdaya : alam, lingkungan, teknologi, manusia, dan kelembagaan untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil perikanan, sehingga mampu mewujudkan swasembada menghadapi persaingan global di tengah peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan berbagai dimensinya.

Dengan strategi di atas, maka Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- (1) Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi;
- (2) Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan;
- (4) Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN); dan
- (5) Konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

3. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu dan didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang diemban. Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut:

a. Program APBD :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ProvinsiProgram Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pesisir dan Laut
- (2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- (4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- (5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



(6) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

b. Program APBN

a) Dekonsentrasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
5. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Program Pengelolaan Ruang Laut



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup potensial merupakan modal bagi pembangunan ekonomi daerah dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Apalagi sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang mampu memberikan dampak terhadap sektor lain dan peningkatan pendapatan masyarakat. Disamping itu, dalam jangka panjang sektor ini juga mempunyai keterkaitan yang besar terhadap kegiatan produksi sektor lain.

Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan jangka pendek atau perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha kelautan dan perikanan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2019 - 2023 ini mengacu pada Perda Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023 telah dirubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tentang kondisi bidang kelautan dan perikanan, visi dan misi, tujuan dan sasaran kebijakan beserta indikator dan target, serta strategi pengelolaan beserta rencana implementasinya. Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023 ini dipakai sebagai acuan/pedoman dan arah kebijakan selama kurun waktu 5 tahun dalam upaya lebih mendekatkan program dan kegiatan dengan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan. Adapun Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2019 - 2023 adalah sebagaimana terlampir.



2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja

2.2.1 Penetapan Kinerja

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2019 - 2023 yang dijabarkan secara tahunan dalam periode 2019 - 2023. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 yang dalam hal ini adalah kegiatan yang tertuang dalam APBD/(DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2021, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dananya bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) tahun anggaran 2021. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, (2) Indikator kinerja dan target capaiannya, (3) Program, (4) Kegiatan dan (5) Indikator kegiatan dan target capaiannya. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2019-2023 meliputi :

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam periode 2019 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Dari 118,5% pada tahun 2022 menjadi 119,2% pada tahun 2023
2. Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap dari 105.166,51 ton pada tahun 2022 menjadi 107.269,84 ton pada tahun 2023
3. Mewujudkan jumlah produksi perikanan budidaya dari 18.981,20 ton pada tahun 2022 menjadi 19.360,82 ton pada tahun 2023
4. Mewujudkan jumlah produksi garam dari 7.018,52 ton pada tahun 2022 menjadi 7.158,89 Ton pada tahun 2023
5. Mewujudkan jumlah produksi Olahan dari 49.997,72 ton pada tahun 2022 menjadi 50.997,67 pada tahun 2023
6. Mewujudkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 1.035.864.000 pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.243.036.800.00 pada tahun 2023
7. Mewujudkan kawasan konservasi perairan dari 4 kawasan pada tahun 2022 menjadi 5 kawasan pada tahun 2023



2.2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Bali adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali atau untuk mewujudkan mengapa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan instansi. Tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yaitu :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2021	2022	2023
Nilai Tukar Nelayan	%	116.6	117.3	117.9	118.5	119.2
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	90.100.75	101.082.77	103.104.42	105.166.51	107.289.84
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	17.690.41	18.244.34	18.699.02	18.981.20	19.360.82
Jumlah Produksi Olahan	Ton	47.113.99	48.056.28	49.017.38	49.997.72	50.997.67
Jumlah Produksi Garam	Ton	6.486.53	6.745.99	6.880.90	7.018.52	7.158.89
Pendapatan Asli Daerah	Rp	650.000.000.00	719.350.000.00	863.220.000.00	1.035.864.000.00	1.243.036.806.00
Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	33.52	34.19	34.87	35.57	36.26
Jumlah Kawasan Konservasi Perairan	Kawasan	1 kawasan	2 kawasan	3 kawasan	4 kawasan	5 kawasan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:



Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	TAHUN 2022			Target Akhir Rencana 2023	Capaian s.d 2022 terhadap sasaran akhir 2023 (%)
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	27,362.47	18,981.20	32,004.90	168.61	19,360.82	165.31
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	113,041.96	105,166.51	101,662.84	96.67	107,269.84	94.77
Jumlah Produksi Olahan	11,873.86	49,997.72	12,019.54	24.04	50,997.67	23.57
Jumlah Produksi Garam	1,342.31	7,018.52	584.58	8.33	2,158.89	8.17
Tingkat Konsumsi Ikan	44.81	35.57	45.87	128.96	36.28	126.43
Pendapatan Asli Daerah	450,158,800.00	1,035,864,000.00	570,235,000.00	55.05	1,347,840,000.00	42.31
Jumlah Kawasan Konservasi Perairan	1	4	1.00	25.00	5.00	20.00

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	KRITERIA/RODE
1	Mewujudkan jumlah produksi perikanan budidaya	- Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	18,981.20	32,004.90	168.61	Green
2	Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap	- Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	105,166.51	101,662.84	96.67	Green
3	Mewujudkan jumlah produksi garam	- Jumlah produksi garam	Ton	7,018.52	584.58	8.33	Red
4	Mewujudkan jumlah produk perikanan bernilai tinggi	- Jumlah produksi olahan	Ton	49,997.72	12,019.54	24.04	Red
		- Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	1,035,864,000.00	570,235,000.00	55.05	Yellow
		- Tingkat konsumsi ikan	Kg/Kapita/thn	35.57	45.87	128.96	Green
5	Mewujudkan kawasan konservasi perairan	- Jumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Kawasan	4	1	25.00	Red



Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis yaitu mewujudkan jumlah produksi perikanan budidaya, tangkap, garam, produk perikanan bersertifikat, serta mewujudkan jumlah produk perikanan bersertifikat, dengan 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, Jumlah Produksi perikanan tangkap, Jumlah Produksi Garam, Jumlah Produksi Olahan, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tingkat Konsumsi Ikan, dan Jumlah Kawasan Konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Pada tahun 2022 dari 7 (tujuh) indikator yang telah ditetapkan dua indikator yang belum memenuhi target yaitu pada kegiatan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan.

3.1.2 Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran diuraikan sebagai berikut :

3.1.2.1 Sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam.

Sasaran Meningkatnya produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam terdiri dari 4 indikator kinerja yaitu Peningkatan produksi perikanan budidaya, Peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi olahan dan peningkatan produksi garam.

Tabel 3.1.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	TAHUN 2022			Target Akhir Rencana 2023	Capaian s.d 2022 terhadap sasaran akhir 2023 (%)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	27,362.47	18,981.20	32,004.90	168.61	19,360.82	165.31
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	113,041.96	105,166.51	101,662.84	96.67	107,269.04	94.77
3	Jumlah Produksi Olahan	40,089.55	49,997.72	12,019.54	29.04	50,997.67	23.57
4	Jumlah Produksi Garam	1,342.31	7,018.52	504.50	6.33	7,158.09	8.17



Capaian sasaran meningkatnya Produksi perikanan budidaya, tangkap, olahan dan garam pada tahun 2022 dengan indikator :

1. Jumlah produksi perikanan budidaya

Capaian indikator jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2022 sebesar 32.004,90 ton (168.61%) dari target RPJMD Provinsi Bali sebesar 18.981,20 ton. Capaian jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2022 tersebut naik 4.642.43 ton (16,97%) bila dibandingkan dengan capaian 2021. Secara time-series dapat diketahui bahwa jumlah produksi budidaya di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah produksi dan pertumbuhan perikanan budidaya selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1.2.1.1 Realisasi Produksi dan Pertumbuhan Perikanan Budidaya Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Produksi Budidaya		
		Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (Ton)	Pertumbuhan (%)
1	2018	17,387.25	(100,961.91)	(88.85)
2	2019	18,534.44	1,147.19	6.60
3	2020	31,862.23	13,327.79	71.91
4	2021	27,362.47	(4,499.77)	(14.12)
5	2022	32,004.90	4,642.43	16.97





Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi perikanan budidaya pada tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana produksi yang menyumbang peningkatan produksi perikanan budidaya dari komoditi udang vaname. Pada tahun

2021 produksi budidaya udang vaname di Provinsi Bali sebesar 2.494,78 ton meningkat di tahun 2022 menjadi 8.054,76 ton. Budidaya udang vaname penyumbang terbesar dari Kabupaten Jembrana. Produksi budidaya ikan juga meningkat hal ini dikarenakan banyak dikembangkan percontohan budidaya baik pada kegiatan budidaya di kolam, IKA maupun bioflok .

2. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Capaian indikator jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebesar 101.662,84 ton atau 96,67% dari target RPJMD Provinsi Bali sebesar 105.166,51 ton. Capaian jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2022 menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dimana pada tahun 2021 produksi sebesar 113.041,96 ton menurun sebesar 11.379,12 ton (10,06%). Secara time-series dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah produksi dan pertumbuhan perikanan tangkap selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022, disajikan dalam tabel berikut.



Tabel. 3.1.2.1.2 Realisasi Produksi dan Pertumbuhan Perikanan Tangkap Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Produksi Tangkap		
		Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (Ton)	Pertumbuhan (%)
1	2018	110,144.73	1,480.79	34.76
2	2019	109,335.22	(809.51)	(0.73)
3	2020	95,973.24	(13,361.98)	(17.22)
4	2021	113,041.96	17,068.72	17.78
5	2022	101,662.84	(11,379.12)	(10.07)



Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, penurunan produksi tangkap tersebut diakibatkan oleh faktor cuaca yaitu gelombang besar pada bulan Nopember dan Desember khusus di wilayah timur Bali diantaranya Kabupaten Buleleng Klungkung dan Karangasem sehingga banyak nelayan tidak bisa melaut.

3. Jumlah Produksi Olahan

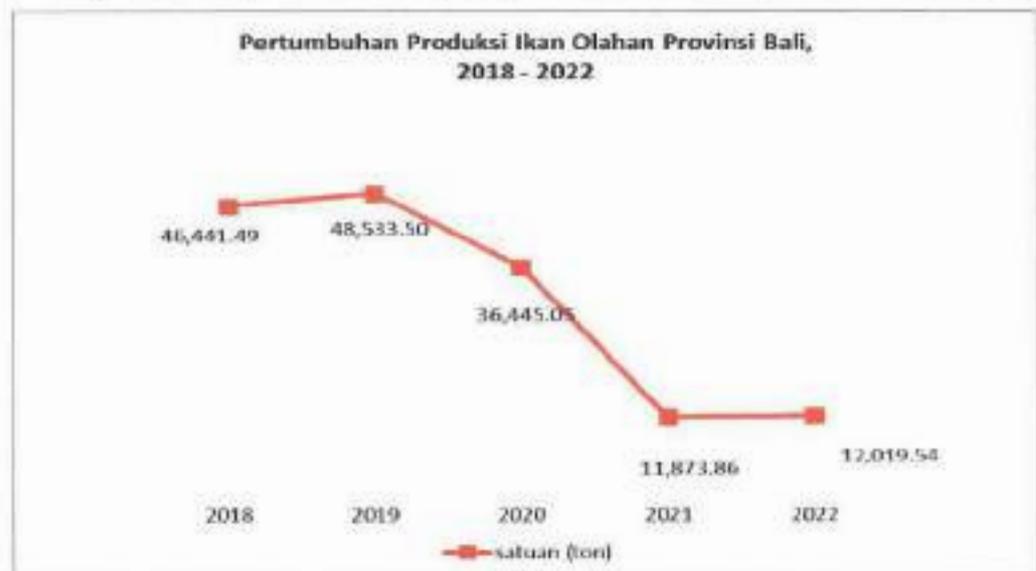
Capaian indikator jumlah produksi olahan sebesar 12.019,54 ton atau 24,04% dari target RPJMD Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 11.873,86 ton. Capaian jumlah produksi olahan tahun 2022 meningkat 145,68 ton (2%) bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Secara time-



series dapat diketahui bahwa jumlah produksi olahan di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah produksi dan pertumbuhan produksi olahan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. . 3.1.2.1.3 Realisasi Produksi dan Pertumbuhan Olahan Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Produksi Olahan		
		Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (Ton)	Pertumbuhan (%)
1	2018	46,441.49	(3,339.32)	56.29
2	2019	48,533.50	2,092.01	4.50
3	2020	36,445.05	(12,088.46)	(24.91)
4	2021	11,873.86	(24,571.19)	(67.42)
5	2022	12,019.54	145.68	1.23





Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa produksi olahan tahun 2022 mengalami peningkatan. Namun masih ada permasalahan yang dihadapi sebagian besar UMKM pengolahan untuk melakukan produksi olahan hasil perikanan adalah lemahnya pemahaman tentang jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui cara berproduksi yang baik (*Good Manufacturing Practice/GMP*) dan penerapan sanitasi pada saat produksi (*Standar Sanitation Operational Procedure/SSOP*) serta pengemasan produk olahan yang belum baik sehingga mutu olahan yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan dan kurang menarik bagi konsumen sehingga kurang memiliki daya saing dipasaran. Menurunnya Capaian produksi perikanan olahan juga disebabkan karena menurunnya kegiatan pengolahan oleh UMKM dimana terjadi pandemik covid-19 yang menyebabkan banyak usaha pengolahan yang tutup.

4. Jumlah Produksi Garam

Capaian indikator jumlah produksi garam sebesar 584,58 ton atau 8,33% dari target RPJMD Provinsi Bali tahun 2022 sebesar 7.018,52 ton.

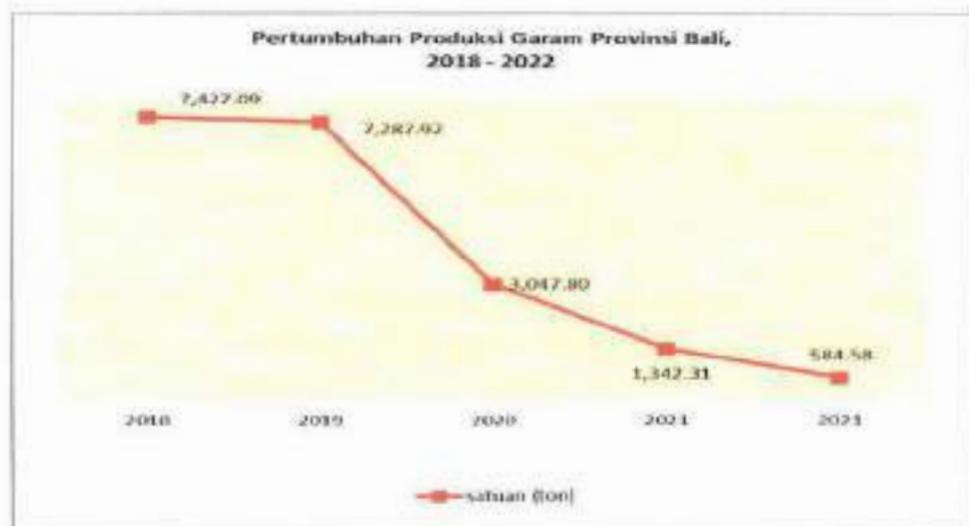


Permasalahan produksi garam belum mencapai target hal ini dikarenakan data produksi garam yang disampaikan oleh Kabupaten Karangasem, Buleleng dan Klungkung belum final 100%. Secara time-series dapat diketahui bahwa jumlah produksi garam di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya. Jumlah produksi dan pertumbuhan produksi garam selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022, disajikan dalam tabel berikut.



Tabel . 3.1.2.1.4 Realisasi Produksi dan Pertumbuhan Produksi Garam Tahun 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah Produksi Garam		
		Jumlah Produksi (Ton)	Pertumbuhan (Ton)	Pertumbuhan (%)
1	2018	7,427.09	(3,341.86)	(75.01)
2	2019	7,287.92	(139.17)	(1.87)
3	2020	3,047.80	(4,240.12)	(58.18)
4	2021	1,342.31	(1,705.49)	(55.96)
5	2022	584.58	(757.73)	(56.45)



Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa produksi garam tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 757,73 ton (56,45%) dari jumlah produksi 1.342,31 ton pada tahun 2021 menjadi 584,58 Ton pada tahun 2022. Capaian produksi garam di tahun 2022 tersebut turun bila dibandingkan dengan tahun 2021, di Kabupaten yaitu Buleleng, Karangasem dan Klungkung masing-masing mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan.

**Permasalahan dan Solusi****Permasalahan**

Capaian target kinerja dari skala nilai perangkat kinerja masih sangat rendah untuk produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, olahan dan garam ini karena data yang disampaikan oleh Kabupaten dan Kota tersebut belum tervalidasi 100% pada satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih dijumpai tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan terkait capaian jumlah produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, olahan dan garam :

1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial
2. Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2022
3. Alih fungsi lahan potensial untuk perikanan budidaya dan garam
4. Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan

Solusi :

1. Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan, penangkapan, pengolahan dan petari garam
2. Pengembangan komoditas unggulan,
3. Pengadaan paket-paket produksi,
4. Pengendalian hama dan penyakit ikan,
5. Pendampingan teknologi terapan,
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan.

3.1.2.2 Sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran meningkatnya pendapatan daerah dari Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel. 3.1.2.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

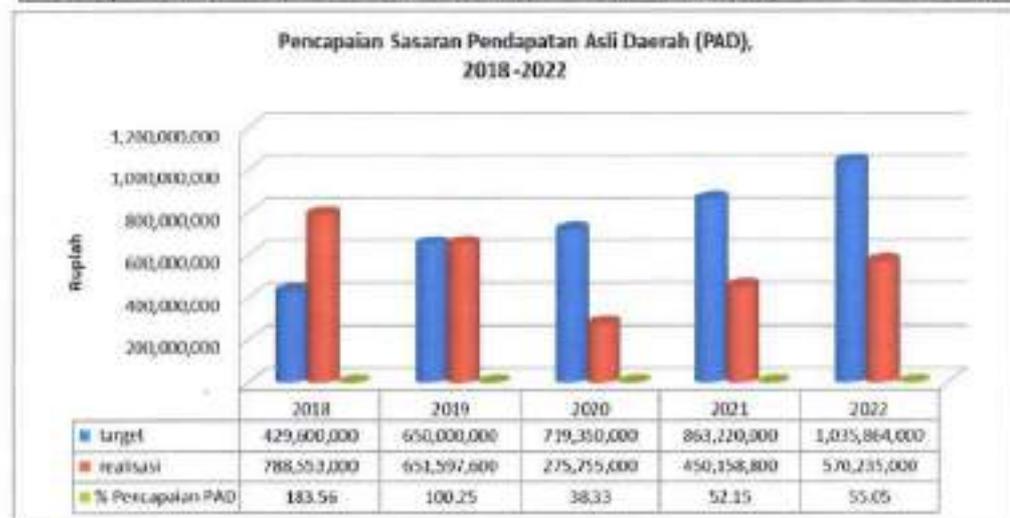
No	Indikator Kinerja Utama	Nilai satuan	Capaian 2021	TAHUN 2022			Target Akhir Semester 2022	Capaian s.d 2021 terhadap sasaran akhir 2022 (%)
				TARGET	REalisasi	CAPAIAN (%)		
1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.	450.000.000,00	1.000.000.000,00	576.275.000,00	57,63	1.307.540.000	42,31

**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Capaian indikator jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp570.235.000 atau 55,05% dari target RPJMD Provinsi Bali tahun 2022 Rp1.035.864.000 atau tidak mencapai target. Capaian PAD tahun 2022 meningkat sangat signifikan dari tahun 2021 sebesar Rp120.076.200. Secara time-series dapat diketahui bahwa jumlah Pendapatan Asli daerah (PAD) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali mengalami peningkatan dari tahun 2021 dan 2022 namun tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengendalian Mutu (UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan) yang semula merupakan kewenangan Provinsi berubah menjadi kewenangan pusat. Jumlah PAD dan pertumbuhan jumlah PAD selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel. 3.1.2.2.2 Realisasi Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tahun 2018 -2022

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
		Jumlah PAD (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2018	788,553,000.00	13,564,810.00	(49.49)
2	2019	651,597,600.00	(136,955,400.00)	(17.37)
3	2020	275,755,000.00	(375,842,600.00)	(57.68)
4	2021	450,158,800.00	174,403,800.00	63.25
5	2022	570,235,000.00	120,076,200.00	26.67





Dari hasil rekapitulasi yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Laboratorium). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan terkait capaian Jumlah Pendaatan Asli Daerah :

- Terbatasnya kewenangan di Daerah

Solusi :

- Pengembangan sumber-sumber pendapatan yang baru

3.1.2.3 Sasaran Meningkatnya Konsumsi Ikan

Sasaran Meningkatnya Konsumsi Ikan terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu indikator Tingkat Konsumsi Ikan.

Tabel . 3.1.2.3 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Nilai satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Rencana 2023	Capaian s.d 2022 terhadap sasaran akhir 2018 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	44,81	35,57	45,87	128,96	36,28	126,43

Capaian sasaran meningkatnya Konsumsi Ikan pada tahun 2022 dengan indikator Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 45,87 (128,96%) dari target RPJMD sebesar 35,57 Kg/Kapita/Th. Capaian Tingkat Konsumsi ikan tahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 1,06 Kg/Kapita/Th (2,36%). Secara time-series dapat diketahui bahwa tingkat konsumsi ikan terus berfluktuasi. Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan dan pertumbuhannya selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :



Tabel. 3.2.3.2 Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan dan Pertumbuhannya Tahun 2018 -2022

No	Tahun	Tingkat Konsumsi Ikan		
		Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	Pertumbuhan (Kg/Kapita/Th)	Pertumbuhan (%)
1	2018	33.26	1.14	2.93
2	2019	31.77	(1.49)	(4.48)
3	2020	38.83	7.06	22.22
4	2021	44.81	5.98	15.40
5	2022	45.87	1.06	2.37





Rekapitulasi yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi Bali pada tahun 2022 sebesar 45,87% dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,37 kg/kapita/Tahun. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan seperti melaksanakan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang merupakan Program Nasional dengan cara Pemberian Makanan Tambahan pada Anak Sekolah (PMTAS) masih kurang pelaksanaan diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masih rendahnya budaya makan ikan di masyarakat.

Solusi :

1. Menggalakkan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)
2. Mensosialisasikan aneka olahan masakan dari bahan baku ikan

3.1.2.4 Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan, ekosistem perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

Sasaran Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan, ekosistem perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu jumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Wilayah	Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir Rencana 2023	Capaian sd 2022 terhadap sasaran akhir 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Jumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Kawasan	1	4	1	25,00	5,00	20,00

Capaian sasaran Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ikan, ekosistem perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2022 dengan indikator jumlah kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan yaitu 1 kawasan (25%) belum mencapai sasaran dimana dari target RPJMD Dinas Kelautan dan Perikanan



Provinsi Bali sebesar 4 kawasan. Hal ini dikarenakan penetapan Kawasan Konservasi masih dalam proses di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mengusulkan untuk penambahan Kawasan sebanyak 2 kawasan yang terdiri dari 6 kawasan yang akan di tetapkan berdasarkan dokumen RZWP3K, Kawasan yang sudah di usulkan tersebut adalah Kawasan konservasi perairan di Buleleng dan Kawasan Konservasi Perairan di Karangasem yang rencananya akan di tetapkan pada tahun 2023 akan tetapi usulan dokumen penetapannya sudah di ajukan dari tahun 2022.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terhadap berbagai ancaman dan berpotensi tumbuhnya konflik kepentingan serta beberapa lokasi pantai di Bali telah mengalami kerusakan akibat erosi/abrasi serta rawan terhadap bencana. Ranperda RZWP-3-K Provinsi Bali belum dapat ditetapkan, karena terdapat rencana alokasi ruang RZWP-3-K Provinsi Bali yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Solusi :

- Pemerintah bersama masyarakat telah dan terus akan melaksanakan rehabilitasi kerusakan ekosistem perairan, karena semua menyadari pentingnya peran terumbu karang bagi kehidupan laut lainnya yang bergantung padanya.
- Percepatan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
- Merencanakan integrasi Penda RTRW Provinsi Bali dan RZWP-3-K Provinsi Bali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



3.2 Aspek Keuangan

Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 Belanja sebesar Rp28.168.313.819,-. Disamping itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali juga mengelola anggaran yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pembangunan perikanan dan kelautan di Provinsi Bali tahun 2022 sebesar Rp1.266627.000,- yang terdiri atas Dana Dekonsentrasi (Dekon) untuk pelaksanaan 6 Satuan Kerja (Satker).

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, realisasi penyerapan anggaran seluruhnya dana APBD sebesar Rp25.978.222.561,- (92,22%). Sedangkan realisasi penyerapan dana APBN sebesar Rp1.117.835.059,- (88,25%), secara rinci realisasi penyerapan anggaran APBD dan APBN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 3.2
Realisasi Penyerapan Anggaran APBD (DPA-OPD) dan APBN Tahun 2022

No	PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 THN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	Sisa	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
A.	BELANJA APBD	28,168,313,819	25,978,222,561	92.22	2,190,091,258	7.78
	BELANJA LANGSUNG					
1.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	24,511,420,290	23,631,490,963	96.41	879,929,327	3.59
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	20,388,956,132	20,079,122,495	98.48	309,833,637	1.52
b.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	508,204,796	508,703,896	99.90	500,900	0.10
c.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	3,090,640,750	2,540,480,000	82.25	550,160,750	17.75
d.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	306,356,916	287,258,896	93.77	19,098,020	6.23
e.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	147,182,196	146,925,676.00	99.83	256,520	0.17
2.	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	848,158,871	784,962,378	92.55	63,196,493	7.45
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	634,162,271	577,512,978	91.07	56,649,293	8.93
b.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	213,996,600	207,449,400	96.94	6,547,200	3.06
3.	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT	790,660,954.00	760,501,062.00	96.19	30,159,892	3.81
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	690,661,184	668,057,171	96.73	22,604,013	3.27
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	99,999,770	92,443,891	92.44	7,555,879	7.56
4.	UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI	1,742,674,048.00	548,979,321.00	31.50	1,193,695,517	68.50
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	596,471,348	496,815,831	83.30	99,655,517	16.70
b.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1,146,202,700	52,163,500	4.55	1,094,039,200	95.45
5.	UPTD. PELABUHAN PERIKANAN	275,398,856.00	252,288,827.00	91.61	23,110,029	8.39
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	275,398,856.00	252,288,827	91.61	23,110,029	8.39



No	PROGRAM / KEGIATAN	BENCANA BEAYA 1 THN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	Sisa	
					Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
B.	APBN	1,266,627,000.00	1,117,835,859.00	88.25	148,791,941.00	11.75
(1)	Dikontribusi	1,266,627,000.00	1,117,835,859.00	88.25	148,791,941.00	11.75
a.	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (01)	116,600,000.00	116,286,900.00	99.73	313,100.00	0.27
b.	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (03)	396,040,000	295,549,980	74.63	100,490,020.00	25.37
c.	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (04)	266,685,000	237,724,795	89.17	28,960,205.00	10.83
d.	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (05)	150,987,000.00	145,184,800.00	96.21	5,712,200.00	3.79
e.	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (06)	105,663,000.00	147,831,974.60	93.99	11,130,025.00	7.01
f.	Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (07)	177,833,000.00	175,556,700.00	98.73	2,256,300.00	1.27

3.2 Aspek Keuangan

Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ditinjau dari aspek efisiensi pemanfaatan sumberdana khususnya keuangan, telah menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaannya. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdapat sisa anggaran sebesar Rp309.833.637,- yaitu rasionalisasi uang makan PNS dan juga rasionalisasi honor pejabat pengelola keuangan. Untuk kegiatan di APBN, realisasi keuangan belum mencapai 100% hal ini dikarenakan terdapat pagu perjalanan dinas keluar kota pada satker 03 tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya surat undangan dan juga terdapat efisiensi anggaran pada setiap satker masing-masing.



BAB IV PENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Berdasarkan penjabaran yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.
- (2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan pelaksanaan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali selama tahun 2022 berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
- (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2022 merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi, evaluasi dan peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali di tahun-tahun yang akan datang.

4.2 TINJAUAN KHUSUS

Meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan diantara Bidang/Sekretaris/UPTD di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal, namun dapat diatasi dengan baik berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang/sekretaris/UPTD di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maupun dengan kabupaten/kota dan masyarakat sasaran program.



4.3 SARAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan untuk mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kinerja pada setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali terus diupayakan untuk mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2019-2023
- (2) Indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran perlu disempurnakan melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus, sehingga dapat dengan lebih jelas mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- (3) Pengukuran kinerja perlu dikembangkan dengan tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
- (4) Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap bidang/sekretaris/UPTD diperlukan pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakkan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2022 ini disajikan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dengan harapan semoga memberikan manfaat bagi kelangsungan pembangunan kelautan dan perikanan di masa yang akan datang.

Bali, Pebruari 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali,



Ir. Putu Sumardiana, MP
NIP. 19670714 199403 1 003